

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN APLIKASI AGRIBISNIS STORE DESA PATTONDON SALU

¹⁾Anita S., ²⁾ Abdul Jabbar, ³⁾ Akhyaruddin Hakim, ⁴⁾ Bahtiar Herman, ⁵⁾ Kamal
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

anitasrg44@gmail.com
jbr_nyonk1@yahoo.com
bahtiarherman.bh@gmail.com
kamalpodding@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah terhadap penerapan Aplikasi Toko Agribisnis di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi angket, wawancara, observasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 2.380 orang dan penarikan sampel yang digunakan menggunakan probability sampling, dengan teknik random sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 88 orang. Analisis data dilakukan bantuan program SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan pemerintah terhadap penerapan aplikasi agribisnis store di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, berada pada persentase sebesar nilai t hitung $\geq t$ table ($5,024 > 1,6627$) dengan $Y = 4,676 + 0,277 X$ atau berada pada kategori baik, sedangkan penerapan aplikasi agribisnis store berada pada persentase 86% dengan ideal 86,33% dari 100% yang diharapkan atau berada pada kategori baik. Masing-masing indikator berada pada kategori baik dengan persentase indikator peran produsen sebesar 84,5%, indikator peran konsumen sebesar 88%, dan indikator peran media sebesar 86%.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah dan Aplikasi Agribisnis

Abstract

The purpose of this research, to find out Government Policy on the application of Agribusiness Store in the Village of Pattondon Salu, Maiewa District, Enrekang Regency, the data analysis technique used is descriptive statistics using data collection technique including questionnaire, interview, and observation. The population in this study were 2.380 people and the sampling used was probability sampling with a random sampling technique in order to obtain a sample of 88 people. Data analysis was performed with the help of the SPSS 21 program. The results of this study indicate that the planning of government policies on the application of agribusiness store applications, in the Village of Pattondon Salu, Maiwa District, Enrekang regency, is at a percentage of value t count $\geq t$ table ($5,024 > 1,6627$) with $Y = 4,676 + 0,277 X$ or is the good category, while the applications of agribusiness store applications is at a percentage of 86 % with an ideal 86,33% from 100% which is expected or is in the good category. Each indicator is in the good category with the percentage of the producer role indicator at 88%, and the media role indicator at 86%.

Keywords : Government policy, Agibusiness store applications

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah pada dasarnya adalah kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat dalam arti luas (negara, masyarakat dalam berbagai status dan untuk kepentingan umum), baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Kebijakan dalam arti pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan menyiratkan adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan. Kehendak itu dinyatakan berdasarkan wewenang yang dimilikinya dalam membuat pengaturan dan bila perlu dengan paksaan. Pernyataan kehendak penguasa dikaitkan dengan konsep pemerintahan yang memberikan pemahaman tentang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah.

Implementasi kebijakan secara sederhana adalah implementasi atau implementasi dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan mengarah pada aktivitas tindakan atau mekanisme yang terbingkai dalam suatu sistem tertentu. Implementasi kebijakan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu.(Affandi & Warjo, Haerul, n.d.). Analisis kebijakan pemerintah perlu dilakukan, terutama yang berkaitan dengan dampak yang dihasilkan. Kebijakan pemerintah dapat diwujudkan dengan membuat undang-undang, merencanakan kegiatan, berbagai intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan pemerintah merupakan salah satu kekuasaan yang dikuasai oleh pemerintah dan menurut undang-undang dan kewenangan pemerintah.

Kebijakan pemerintah sama dengan otonomi daerah, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah). Dan mempunyai dasar hukum, antara lain UUD, Keputusan MPR-RI No. keputusan MPR-RI. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: pengaturan tentang pembagian dan pendayagunaan sumber daya manusia nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah, pada prinsipnya, mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah yang mengutamakan pelaksanaan prinsip desentralisasi.

Kebijakan pemerintah yang baik adalah kebijakan yang dilaksanakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal perkembangan teknologi. Oleh karena itu, Pemerintah di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang berusaha mewujudkan hal tersebut.(Jamaluddin Ahmad, 2015). Menurut Shany & Westantia (2018) aplikasi adalah perangkat lunak, yang dimana sebuah program komputer yang isinya dapat diubah dengan mudah. Kebutuhan manusia sehari-hari terus meningkat dan kesibukan tidak dapat dihindarkan, begitu juga dengan teknologi industri di bidang Agribisnis. Konsekuensi dari perubahan global yang mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Jadi sektor pertanian juga terpengaruh. Sehingga terjadi transformasi teknologi di bidang Agribisnis yaitu terbentuknya Aplikasi Agribisnis.

Aplikasi agribisnis atau dengan kata lain E-Agribusiness adalah kegiatan bisnis melalui layanan elektronik. Kegiatan usaha pada dasarnya adalah transaksi barang dan jasa. Menurut (Soekartawi) dalam bukunya 'Manajemen Pemasaran. Hasil-hasil Pertanian: Teori dan Aplikasinya. menyatakan bahwa Aplikasi Agribisnis merupakan sarana untuk memasarkan hasil pertanian melalui internet. Kini dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat melakukan transaksi hanya dengan menggunakan komputer atau handphone yang terhubung dengan jaringan internet. Agrobisnis merupakan sarana promosi yang efektif, efisien, murah, praktis, tidak terbatas, dan dan boleh digunakan untuk membina kesetiaan pelanggan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843). Pasal 4 b menyatakan bahwasanya pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan tujuan mengembangkan perdagangan dan ekonomi negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian disusul dengan Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348). Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, membuat Aplikasi yaitu "Agribisnis Store", aplikasi ini dibuat pada bulan Februari tahun 2020. Walaupun Aplikasi Agribisnis Store mempunyai beberapa keunggulan namun dalam penerapannya mengenai kebijakan pemerintah di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa kendala, antara lain Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebijakan penerapan aplikasi agribisnis store, Tidak semua tempat terhubung dengan fasilitas jaringan internet. Sehingga persoalan ketersediaan infrastruktur ini menjadi sangat penting, Kualitas Sumber Daya Manusia di desa pada umumnya masih rendah, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung perkembangan potensi desa yang berbasis digital, Tidak semua masyarakat mengerti dalam menggunakan aplikasi (karena pendidikannya, tingkat-sosial ekonominya).

Peran pemerintah maupun masyarakat sangat berperan penting, pemerintah dengan menerapkan beberapa kebijakan diharapkan sesuai dengan situasi dan kondisi, dan masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut. Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik ingin mengkaji, meneliti, menganalisa dan mengetahui lebih dalam tentang "Kebijakan Pemerintah terhadap Penerapan Aplikasi Agribisnis Store di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang". dengan tujuan untuk mengetahui perencanaan kebijakan pemerintah terhadap penerapan Aplikasi Agribisnis Store di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui penerapan Aplikasi Agribisnis Store di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Menurut Dunn (2017) tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 7 tahap yaitu Penyusunan Agenda/Agenda Setting, Formulasi Kebijakan, Legitimasi Kebijakan Pemerintah, Pemilihan Alternatif Kebijakan, Tahap Penetapan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan. Menurut Soekartawi (2016) Ada tiga aktor dalam mekanisme e-Agribusiness yaitu Peran Produsen, Peran Konsumen, Peran Media Informasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kuantitatif dengan dua variabel, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi angket, wawancara, dan observasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 2.380 orang dan penarikan sampel yang digunakan menggunakan probability sampling, dengan teknik random sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 88 orang. Analisis data dilakukan bantuan program SPSS 21.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan kebijakan pemerintah terhadap penerapan aplikasi agribisnis store di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, berada pada persentase sebesar nilai t hitung $\geq t$ table ($5,024 > 1,6627$) dengan $Y = 4,676 + 0,277 X$ atau berada pada kategori baik, sedangkan penerapan aplikasi agribisnis store berada pada persentase 86% dengan ideal 86,33% dari 100% yang diharapkan atau berada pada kategori baik. Masing-masing indikator berada pada kategori baik dengan persentase indikator peran produsen sebesar 84,5%, indikator peran konsumen sebesar 88%, dan indikator peran media sebesar 86%.

Kebijakan pemerintah dalam menyusun program kerja desa, dalam hal ini pemerintah melihat kelebihan dan kekurangan program kerja pada tahun sebelumnya yang kemudian menyesuaikan kebutuhan di tahun berikutnya. Keterbukaan pemerintah dalam menyusun program kerja terhadap penerapan aplikasi, dalam hal ini sebelum melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) terlebih dahulu pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tertulis berbentuk surat kepada masing-masing perwakilan Dusun di Desa Pattondon Salu. Ketiga, bagaimana Kinerja pemerintah dalam melaksanakan program kerja terhadap penerapan aplikasi Agribisnis Store, kesimpulan dari jawaban beberapa masyarakat adalah pada saat pertama kali diperkenalkannya Aplikasi Agribisnis Store masyarakat setempat langsung tertarik dalam menggunakan aplikasi, tetapi ada beberapa wilayah yang masih terkendala oleh jaringan internet, namun saat ini pemerintah sedang berusaha untuk terus memperbaiki kekurangan tersebut, Keempat, bagaimana

keputusan pemerintah terhadap pengadaan Aplikasi Agribisnis Store, kesimpulan dari jawaban beberapa masyarakat adalah dilihat dari mata pencarian masyarakat di Desa Pattondon Salu kebanyakan adalah petani dan pekebun maka penerapan aplikasi ini sangat tepat untuk pekerjaan masyarakat. Kelima, bagaimana manfaat Aplikasi Agribisnis Store, kesimpulan dari jawaban beberapa masyarakat adalah aplikasi ini sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan proses jual beli dari hasil pertanian maupun perkebunan di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

D. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan aplikasi agribisnis store di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan nilai thitung \geq t table ($5,024 > 1,6627$) dengan $Y = 4,676 + 0,277 X$ yang artinya terjadi perubahan yang searah dengan meningkatnya nilai penerapan aplikasi agribisnis store sebesar 0,277, kebijakan pemerintah juga akan meningkat sebesar 0,277. Kebijakan pemerintah terhadap penerapan aplikasi agribisnis store di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil rekapitulasi indikator aplikasi agribisnis store berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 86% dengan ideal 86,33% dari 100% yang diharapkan. Masing-masing indikator berada pada kategori baik dengan persentase indikator peran produsen sebesar 84,5%, indikator peran konsumen sebesar 88%, dan indikator peran media sebesar 86%. Kesimpulan dari jawaban beberapa masyarakat adalah dilihat dari mata pencarian masyarakat di Desa Pattondon Salu kebanyakan adalah petani dan pekebun maka penerapan aplikasi ini sangat tepat untuk pekerjaan masyarakat. Kelima, bagaimana manfaat Aplikasi Agribisnis Store, kesimpulan dari jawaban beberapa masyarakat adalah aplikasi ini sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan proses jual beli dari hasil pertanian maupun perkebunan di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

E. REFERENSI

Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

- Misna, A. (2015). Perumusan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 6–7.
- Munthe, A. (2015). PENTINGNYA EVALUASI PROGRAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 1.
- Nugrohu, R. D. (2003). *Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratiwi, S. E. (2013). Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Journal Unair*, 4(4), 1–7.
- Ramdhani, A. (2016). Konsep Umum Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–1.
- Sahar, M. T. (2021). Efektivitas Kebijakan pemerintah Menanggulangi Covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA*, 76-86.
- Sahar, W. (2020). Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa tentang Kawasan Bebas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tempat Umum Desa Carawali). *Jurnal Ilmiah Administrasi (JIA)*, 20-29.
- Sahar, W. M. (2021). Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Administrasi (JIA)*, 33-37.
- SARAGIH, B. (2001). Pengembangan Sistem Agribisnis Di Indonesia Dan Peran Humas. *SOCA: Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 1(2), 1–12.
- Suwitri, S. (. (n.d.). Konsep Dasar Kebijakan Publik & Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi . 1, 1–51.
- Terbatas, P. M. (2013). PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD). 2(2), 220–238.